

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Landasan Teori**

Sebelum melakukan penelitian lebih lanjut, penulis perlu mengemukakan teori-teori sebagai kerangka berpikir yang berguna untuk menggambarkan dari sudut mana penelitian melihat masalah yang akan diteliti.

Menurut Sugiyono (2019: 85), “teori adalah alur logika atau penalaran, yang merupakan seperangkat konsep, definisi, dan proposisi yang di susun secara sistematis. Teori merupakan seperangkat proposisi yang menggambarkan suatu gejala terjadi seperti ini. Untuk memudahkan penelitian diperlukan pedoman berfikir yaitu kerangka teori. Sebelum melakukan penelitian yang lebih lanjut seorang peneliti perlu menyusun suatu kerangka teori sebagai landasan berfikir untuk menggambarkan dari sudut mana peneliti menyoroti masalah yang dipilih (Suyanto, 2010: 34). Dalam hal ini yang menjadi landasan teori adalah:

##### **2.1.1 Akuntansi Sektor Publik**

Akuntansi Sektor Publik mengajarkan suatu ilmu akuntansi dalam ruang lingkup organisasi sektor publik. Sektor publik yang dimaksud antara lain seperti organisasi pemerintahan pusat dan daerah, BUMN, BUMD, LSM dan yayasan sosial, maupun pada proyek-proyek kerja sama sektor publik dan swasta (Bastian, 2010: 6). Akuntansi sektor publik adalah sebuah proses untuk mengumpulkan, mencatat, mengklasifikasikan, menganalisis serta membuat laporan transaksi keuangan untuk sebuah organisasi publik yang menyediakan informasi keuangan bagi pihak yang membutuhkannya untuk digunakan saat pengambilan sebuah keputusan. Menurut Bastian (2010: 6) Akuntansi sektor publik adalah sebuah mekanisme teknik serta analisa akuntansi yang dijalankan untuk mengelola dana masyarakat di lembaga tinggi negara dan departemen dibawahnya. Akuntansi sektor publik memiliki peran utama untuk menyiapkan laporan keuangan sebagai salah satu bentuk pelaksanaan akuntabilitas publik. Sektor publik memiliki tujuan utama organisasi bukan untuk memaksimalkan laba melainkan memberi pelayanan publik (public service), misalnya: pendidikan,

kesehatan masyarakat, penegakan hukum, keamanan, transportasi publik dan penyediaan barang kebutuhan publik. Selain memberikan pelayanan publik, organisasi sektor publik juga memiliki tujuan lain yaitu tujuan finansial. Mardiasmo (2009: 14) menjelaskan adanya finansial pada organisasi sektor publik mengenai usaha pemerintah untuk meningkatkan penerimaan negara, peningkatan laba pada perusahaan- perusahaan milik negara atau milik daerah (BUMN atau BUMD). Pada sektor publik tujuan finansial untuk memaksimalkan pelayanan publik, karena untuk memberikan pelayanan publik di perlukan dana.

Menurut *American Accounting Association (1970)* menyatakan bahwa tujuan akuntansi sektor publik adalah :

1. Memberikan informasi yang diperlukan guna mengelola secara efektif, efisien dan ekonomis atas sumberdaya yang dipercayakan kepada organisasi. Tujuan ini terkait pengendalian manajemen (*management control*).
2. Memberikan informasi yang memungkinkan bagi manajer dapat melaporkan pelaksanaan dan tanggungjawab program secara efektif dan efisien dan penggunaan sumberdaya yang menjadi wewenangnya dan bagi pegawai pemerintah dapat melaporkan kepada publik (masyarakat) hasil aktivitas pemerintah dan penggunaan dana publik. Tujuan ini terkait dengan akuntabilitas (*accountability*).

### **2.1.2 Pendapatan Daerah**

Pendapatan daerah merupakan penerimaan yang sangat penting bagi pemerintah daerah dalam menunjang pembangunan daerah guna membiayai proyek-proyek dan kegiatan-kegiatan daerah. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2019 tentang “ Pengelolaan Keuangan Daerah” yang dimaksud dengan Pendapatan Daerah adalah: “Semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah yang tidak perlu dibayar kembali oleh daerah dan penerimaan lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai penambah ekuitas yang merupakan hak daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran. Sedangkan menurut Abdul Halim (2002: 64) menyatakan bahwa Pendapatan Daerah adalah: “Semua penerimaan daerah dalam bentuk peningkatan aktiva atau penurunan utang dalam berbagai sumber dalam periode tahun anggaran bersangkutan”, dan definisi pendapatan daerah menurut *IASC Frame Work* yaitu : “Penambahan dalam manfaat ekonomi selama

periode akuntansi dalam bentuk arus masuk atau peningkatan asset/aktiva, atau pengurangan utang / kewajiban yang mengakibatkan penambahan ekuitas dana selain penambahan ekuitas dana yang berasal dari kontribusi beserta ekuitas dana.”

Berdasarkan ketiga pengertian tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa pendapatan daerah merupakan penerimaan yang diperoleh pemerintah daerah yang dapat ditinjau dari tingkat kenaikan aktiva ataupun penurunan utang yang dapat digunakan oleh pemerintah dalam membangun dan mengembangkan suatu daerah dalam periodetahun anggaran yang bersangkutan. Pendapatan Daerah sebagai penerimaan kas daerah merupakan sarana pemerintah daerah untuk melaksanakan tujuan, mengoptimalkan kemakmuran rakyat yaitu menumbuh kembangkan masyarakat disegala bidang kehidupan. Berdasarkan PP Nomor 12 Tahun 2019, pendapatan daerah dikelompokkan menjadi 3 kelompok yaitu:

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD).
2. Pendapatan Transfer.
3. Lain-lain Penerimaan yang sah.

#### **2.1.2.1 Pendapatan Asli Daerah (PAD)**

Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pendapatan Asli Daerah sebagai sumber penerimaan daerah perlu terus ditingkatkan agar dapat menanggung sebagian belanja yang diperlukan untuk penyelenggaraan pemerintah dan kegiatan pembangunan yang setiap tahun meningkat sehingga kemandirian otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab dapat dilaksanakan (Darise, 2009: 43). Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, “Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah dan dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.” Sumber pendapatan asli daerah diperoleh dari pajak daerah, retribusi daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan Lain-lain PAD yang sah (UU No 33 Tahun 2004 pasal 1, ayat 18). Sumber-sumber penerimaan PAD harus dicari terus untuk digunakan sebagai pembiayaan pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan daerah dalam era

otonomi daerah. Pendapatan Asli Daerah memiliki tujuan untuk memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi. Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan yang diperoleh dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah (Mardiasmo, 2011: 132). Pemerintah daerah secara umum masih menghadapi permasalahan dalam pengelolaan penerimaan daerah terutama yang bersumber dari pendapatan asli daerah. Permasalahan tersebut disebabkan oleh kurangnya sumber daya manusia dalam mengelola penerimaan di daerah. Menurut Mardiasmo (2011: 146) masalah-masalah yang disebutkan tersebut adalah :

1. Tingginya tingkat kebutuhan daerah yang tidak sesuai dengan kapasitas fiskal yang dimiliki daerah, sehingga menimbulkan fiskal.
2. Kualitas layanan publik yang masih memperhatikan menyebabkan produk layanan publik yang sebenarnya dapat dijual kepada masyarakat direspon secara negatif, sehingga menyebabkan keengganan masyarakat untuk taat membayar pajak dan retribusi daerah.
3. Lemahnya infrastruktur prasarana dan sarana umum.
4. Berkurangnya dan bantuan dari pusat (DAU dari pusat yang tidak mencukupi).
5. Belum diketahuinya potensi PAD yang mendekati kondisi riil.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 32 Tahun 2004, sumber-sumber PAD adalah :

1. Pajak Daerah  
Pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang atau badan kepala tanpa imbalan langsung yang seimbang yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah. Menurut Mardiasmo (2011: 12), pajak daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Retribusi Daerah  
Berdasarkan UU Nomor 28 Tahun 2009, Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Adapun ciri-ciri retribusi menurut Haritz (2011: 86) adalah :
  1. Pelaksanaan bersifat ekonomis.
  2. Ada imbalan langsung kepada membayar

3. Iuran memenuhi persyaratan formal dan material tetapi tetap ada alternatif untuk membayar.
4. Retribusi merupakan pungutan yang umumnya budgetingnya tidak menonjol.

Dalam hal-hal tersebut retribusi daerah digunakan untuk suatu tujuan tertentu, tetapi dalam banyak hal tidak lebih dari pengambilan biaya yang telah dibukukan oleh pemerintah daerah untuk memenuhi permintaan masyarakat. Namun hasil riil yang dapat disumbangkan sektor ini bagi keuangan daerah masih sangat terbatas karena tidak semua jenis retribusi yang dipungut Kabupaten/Kota memiliki prospek yang cerah. Lebih lanjut Koho memberikan ciri-ciri pokok retribusi daerah sebagai berikut :

1. Retribusi dipungut daerah.
2. Dalam pungutan retribusi terdapat prestasi yang diberikan daerah yang langsung dapat di tunjuk.
3. Retribusi dikenakan kepada siapa saja yang memanfaatkan atau mengenyam jasa yang disediakan daerah.
3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan  
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, Pendapatan Asli Daerah yang sah, disediakan untuk menganggarkan penerimaan daerah yang tidak termasuk dalam jenis pajak dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Pendapatan ini juga merupakan penerimaan daerah yang berasal dari lain-lain milik pemerintah daerah.
4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah  
Lain-lain PAD yang sah ialah pendapatan-pendapatan yang tidak termasuk dalam jenis-jenis pajak daerah, retribusi daerah, serta hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Menurut Pasal 6 Undang-Undang No. 33 Tahun 2004, lain-lain PAD yang sah meliputi :
  - a. Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan
  - b. Jasa giro
  - c. Pendapatan bunga
  - d. Keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, dan
  - e. Komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh daerah.

### **2.1.3 Belanja Daerah**

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa belanja daerah merupakan semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang tidak perlu dibayar kembali oleh Daerah dan pengeluaran lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai pengurang ekuitas yang merupakan kewajiban daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran, sedangkan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 menyebutkan belanja daerah merupakan perkiraan beban

pengeluaran daerah yang dialokasikan secara adil dan merata agar relatif dapat dinikmati oleh seluruh kelompok masyarakat tanpa diskriminasi, khususnya dalam pemberian pelayanan umum. Pengertian Belanja menurut PSAP No.2 adalah “Semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah yang mengurangi saldo Anggaran lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah”. Sedangkan menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang “Belanja Daerah didefinisikan sebagai kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih”. Istilah belanja terdapat dalam laporan realisasi anggaran, karena dalam penyusunan laporan realisasi anggaran masih menggunakan basis kas. Belanja diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi (jenis belanja), organisasi dan fungsi. Klasifikasi ekonomi adalah pengelompokan belanja yang didasarkan pada jenis belanja untuk melaksanakan suatu aktifitas. Klasifikasi belanja menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintah untuk tujuan pelaporan keuangan menjadi:

1. Belanja Operasi  
Belanja Operasi adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah pusat/daerah yang memberi manfaat jangka pendek.  
Belanja Operasi meliputi:
  - a) Belanja Pegawai
  - b) Belanja Barang
  - c) Subsidi
  - d) Hibah
  - e) Bantuan Sosial
2. Belanja Modal  
Belanja Modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap berwujud yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Nilai aset tetap dalam belanja modal yaitu sebesar harga beli/bangunan aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai aset tersebut siap digunakan. Belanja Modal meliputi:
  - a) Belanja Modal Tanah
  - b) Belanja Modal Peralatan dan Mesin
  - c) Belanja Modal Gedung dan Bangunan
  - d) Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan
  - e) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya
  - f) Belanja Aset Lainnya.
3. Belanja Lain-Lain/Belanja Tidak Terduga  
Belanja lain-lain atau belanja tak terduga adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang

seperti penanggulangan bencana alam, bencana sosial, dan pengeluaran tidakterduga lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan pemerintah pusat/daerah.

4. Belanja Transfer

Belanja Transfer adalah pengeluaran anggaran dari entitas pelaporan yang lebih tinggi ke entitas pelaporan yang lebih rendah seperti pengeluaran dana perimbangan oleh pemerintah provinsi ke kabupaten /kota serta dana bagi hasil dari kabupaten/kota ke desa.

Belanja Daerah dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah menyebutkan bahwa belanja daerah dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan provinsi atau kabupaten/kota yang terdiri dari urusan wajib, urusan pilihan dan urusan yang penanganannya dalam bagian atau bidang tertentu yang dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah dan pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Dalam menyusun LRA, sebagaimana diatur dalam PSAP Nomor 02, klasifikasi yang dicantumkan pada lembar muka laporan keuangan adalah menurut jenis belanja. Untuk pemerintahan daerah, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 yang kemudian dijabarkan dalam Permendagri Nomor 13 Tahun 2006, belanja diklasifikasikan berdasarkan jenis belanja sebagai belanja tidak langsung dan belanja langsung. Kelompok belanja tidak langsung merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Kelompok belanja langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan.

Selanjutnya, kelompok belanja tidak langsung berdasarkan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 dibagi menurut jenis belanja yang terdiri dari:

1. Belanja Pegawai

Belanja pegawai merupakan belanja kompensasi, dalam bentuk gaji dan tunjangan, serta penghasilan lainnya yang diberikan kepada pegawai negeri sipil yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

2. Belanja Bunga

Belanja bunga digunakan untuk menganggarkan pembayaran bunga utang yang dihitung atas kewajiban pokok utang (*principal outstanding*) berdasarkan perjanjian pinjaman jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang.

3. **Belanja Subsidi**  
Belanja subsidi digunakan untuk menganggarkan bantuan biaya produksi kepada perusahaan/ lembaga tertentu agar harga jual produksi/ jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat banyak. Belanja subsidi dianggarkan sesuai dengan keperluan perusahaan/ lembaga penerima subsidi dalam peraturan daerah tentang APBD yang peraturan pelaksanaannya lebih lanjut dituangkan dalam peraturan kepala daerah.
4. **Belanja Hibah**  
Belanja hibah bersifat bantuan yang tidak mengikat/ tidak secara terus menerus dan harus digunakan sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam naskah perjanjian hibah daerah.
5. **Bantuan Sosial**  
Bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan dalam bentuk uang dan/ atau barang kepada masyarakat yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. Bantuan sosial diberikan tidak secara terus menerus/ tidak berulang setiap tahun anggaran, selektif dan memiliki kejelasan peruntukan penggunaannya.
6. **Belanja Bagi Hasil**  
Belanja bagi hasil digunakan untuk menganggarkan dana bagi hasil yang bersumber dari pendapatan provinsi kepada kabupaten/ kota atau pendapatan kabupaten/ kota kepada pemerintah desa atau pendapatan pemerintah daerah tertentu kepada pemerintah daerah lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
7. **Bantuan Keuangan**  
Bantuan keuangan digunakan untuk menganggarkan bantuan keuangan yang bersifat umum atau khusus dari provinsi kepada kabupaten/ kota, pemerintah desa, dan kepada pemerintah daerah lainnya atau dari pemerintah kabupaten/ kota kepada pemerintah desa dan pemerintah daerah lainnya dalam rangka pemerataan dan/ atau peningkatan kemampuan keuangan. Bantuan keuangan bersifat umum peruntukan dan penggunaannya diserahkan sepenuhnya kepada pemerintah daerah/ pemerintah desa penerima bantuan. Bantuan keuangan yang bersifat khusus peruntukan dan pengelolaannya diarahkan/ ditetapkan oleh pemerintah daerah pemberi bantuan.
8. **Belanja Tidak Terduga**  
Belanja tidak terduga merupakan belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam, dan bencana sosial yang tidak pernah diperkirakan sebelumnya, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup.

Kelompok belanja langsung dari suatu kegiatan berdasarkan Permendagri

Nomor 13 Tahun 2006 dibagi menurut jenis belanja yang terdiri dari:

1. **Belanja Pegawai**  
Belanja pegawai digunakan untuk pengeluaran honorarium atau upah dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintah daerah.

2. Belanja Barang dan Jasa

Belanja barang dan jasa digunakan untuk pengeluaran pembelian/ pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan dan/ atau pemakaian jasa dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan daerah. Pembelian/ pengadaan barang dan/ atau pemakaian jasa mencakup belanja barang pakai habis, bahan/ material, jasa kantor, premi asuransi, perawatan kendaraan bermotor, catek/ pengadaan, sewa rumah/ gedung/ gudang/ parkir, sewa sarana mobilitas, sewa alat berat, sewa perlengkapan dan peralata kantor, makanan dan minuman, pakaian dinas dan atributnya, pakaian kerja, pakaian khusus dan hari – hari tertentu, perjalanan dinas, perjalanan dinas pindah tugas dan pemulangan pegawai.

3. Belanja Modal

Belanja Modal digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/ pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan, seperti dalam bentuk tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan dan aset tetap lainnya. Nilai pembelian/ pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang dianggarkan dalam belanja modal hanya sebesar harga beli/ bangun aset. Belanja honorarium panitia pengadaan dan administrasi pembelian/ pembangunan untuk memperoleh setiap aset yang dianggarkan pada belanja modal dianggarkan pada belanja pegawai dan/ atau belanja barang dan jasa.

Selain itu, menurut Permendagri Nomor 64 tahun 2013 belanja diklasifikasikan menjadi seperti berikut:

1. Belanja Operasi

Belanja Operasi adalah belanja yang dikeluarkan dari Kas Umum Negara/Daerah dalam rangka menyelenggarakan operasional pemerintah. Belanja Operasi selanjutnya diklasifikasikan lagi menjadi:

- a) Belanja Pegawai
- b) Belanja Barang
- c) Bunga
- d) Subsidi
- e) Hibah
- f) Bantuan Sosial

2. Belanja Modal

Belanja Modal adalah belanja yang dikeluarkan dalam rangka membeli dan/atau mengadakan barang modal. Belanja modal digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (duabelas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan, seperti dalam bentuk tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya. Nilai

pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang dianggarkan dalam belanja modal hanya sebesar harga beli/bangun aset.

### 3. Belanja Tak Terduga

Belanja Tak Terduga adalah belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup.

Belanja Daerah, meliputi semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang mengurangi ekuitas dana, merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh daerah.

#### 2.1.4 Investasi

Investasi merupakan komitmen atas sejumlah dana atau sumberdaya lainnya yang dilakukan pada saat ini, dengan tujuan memperoleh sejumlah keuntungan di masa datang. Seorang investor membeli sejumlah saham saat ini dengan harapan memperoleh keuntungan dari kenaikan harga saham ataupun sejumlah deviden di masa yang akan datang, sebagai imbalan atas waktu dari risiko yang terkait dengan investasi tersebut (Tandelilin, 2010). Sedangkan pengertian investasi menurut Sunariyah yang dikutip dalam Salamah (2011) adalah penanaman modal untuk satu atau lebih aktiva yang dimiliki dan biasanya berjangka waktu lama dengan harapan mendapat keuntungan di masa-masa yang akan datang. Menurut Jogiyanto (2012), investasi adalah penundaan konsumsi sekarang untuk dimasukkan ke aktiva produktif selama periode waktu yang tertentu. Dengan adanya aktiva yang produktif, penundaan konsumsi sekarang untuk diinvestasikan ke aktiva yang produktif tersebut akan meningkatkan utiliti total. Pengertian Investasi menurut Ikatan Akuntan Indonesia dalam Standar Akuntansi Keuangan (2017: 13) adalah:

Investasi merupakan suatu aset yang digunakan perusahaan untuk pertumbuhan kekayaan (*accretion of wealth*) melalui distribusi hasil investasi (seperti bunga, royalti, dividen dan uang sewa), untuk apresiasi nilai investasi, atau untuk manfaat lain bagi perusahaan yang berinvestasi seperti manfaat yang diperoleh melalui hubungan perdagangan.

Sedangkan menurut Definisi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia:

Investasi diartikan sebagai penanaman uang di suatu perusahaan atau proyek untuk tujuan memperoleh keuntungan.

Berdasarkan definisi di atas, investasi adalah bagaimana memanfaatkan dana saat ini untuk mendapatkan keuntungan atau menghasilkan barang yang lebih besar di masa yang mendatang. Untuk mencapai suatu efektivitas dan efisiensi dalam keputusan investasi terdapat beberapa tujuan dalam melakukan investasi (Tandelilin, 2010), yaitu:

1. Mendapat kesejahteraan atau kehidupan yang lebih baik dimasa yang akan datang. Seseorang akan berfikir bagaimana untuk dapat meningkatkan taraf hidupnya untuk memperoleh kehidupan yang lebih layak di masa depan.
2. Membantu mengurangi tekanan inflasi.
3. Terciptanya keuntungan dalam investasi yang berkesinambungan.
4. Penghematan pajak.

Sebelum melakukan investasi, sebaiknya investor harus mengetahui instrumen-instrumen investasi. Tujuannya adalah agar investor bisa menentukan instrumen mana yang paling baik. Terdapat tiga instrumen dasar yang perlu dipahami, yaitu:

1. Obligasi  
Obligasi umumnya mendapat bunga yang tetap yang disebut dengan kupon. Karena obligasi mendapatkan bunga yang besarnya tetap, maka obligasi juga termasuk dalam investasi dengan pendapatan tetap. Obligasi (bond) dapat didefinisikan sebagai utang jangka panjang yang akan dibayar kembali pada saat jatuh tempo dengan bunga yang tetap jika ada (Jogiyanto, 2012). Dari definisi tersebut dapat dimengerti bahwa obligasi adalah suatu 9 hutang atau kewajiban jangka panjang (bond), sedangkan utang jangka pendek disebut bill. Nilai utang dari obligasi akan dibayarkan pada saat jatuh temponya. Nilai utang dari obligasi ini dinyatakan di dalam surat hutangnya.
2. Saham  
Saham berbeda dengan obligasi. Saham memberikan hak kepemilikan dan saham tidak memberikan bunga melainkan keuntungan. Saham yang diterbitkan emiten ada 2 macam, yaitu saham biasa (common stock) dan saham istimewa (preffered stock). Perbedaan saham ini terletak pada hak yang melekat pada saham tersebut yaitu hak atas deviden, bagian dari kekayaan jika perusahaan dilikuidasi setelah dikurangi semua kewajiban perusahaan.
3. Reksa Dana  
Reksa dana (*mutual fund*) merupakan jenis instrumen investasi yang juga tersedia di pasar modal. Reksa dana diartikan sebagai wadah yang berisi

sekumpulan sekuritas yang dikelola oleh perusahaan investasi dan dibeli oleh investor (Tandelilin, 2010). Hasil investasi reksa dana dibagikan secara proporsional kepada pihak yang terlibat, manajer investasi (pengelola), bank kustodian, dan distribusi.

#### **2.1.4.1 Penanaman Modal Dalam Negeri**

Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri. Berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal menyatakan bahwa : “Penanaman modal dalam negeri adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri.” Yang dimaksud dengan modal dalam negeri adalah modal yang dimiliki oleh negara Republik Indonesia, perseorangan warga negara Indonesia, atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau tidak berbadan hukum. Berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 dijelaskan bahwa PMDN dapat dilakukan dalam bentuk badan usaha yang berbentuk badan hukum, tidak berbadan hukum, atau usaha perseorangan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 lebih lanjut menjelaskan, hal-hal yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri dan asing yang melakukan penanaman modal dalam bentuk PT, yaitu mengambil bagian saham pada saat pendirian perseroan terbatas, membeli saham dan melakukan cara lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penanam modal dalam negeri bisa dilakukan oleh individu, badan usaha Negara dan / atau pemerintah sendiri membuat investasi di wilayah Republik Indonesia. Kegiatan usaha usaha atau jenis usaha terbuka bagi kegiatan penanaman modal, kecuali bidang usaha atau jenis usaha yang dinyatakan tertutup dan terbuka dengan persyaratan dan pembatasan kepemilikan aset Negara alih bisnis dari perusahaan diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2010 tentang Daftar Perubahan Bidang Usaha tertutup dan Buka Bisnis dengan persyaratan di Sektor Investasi atau Penanaman Modal. Penyelenggaraan

pembangunan ekonomi nasional adalah untuk mempertinggi kemakmuran rakyat, terdapat latar belakang mengapa investasi dalam negeri perlu dilakukan karena merupakan faktor yang sangat penting dan menentukan. Berikut faktor- faktor yang melatarbelakangi perlunya menanam modal dalam negeri sebagai berikut :

1. Perlu diselenggarakan pemupukan dan pemanfaatan modal dalam negeri dengan cara rehabilitasi pembaharuan, perluasan , pemmbangunan dalam bidang produksi barang dan jasa.
2. Perlu diciptakan iklim yang baik, dan ditetapkan ketentuan-ketentuan yang mendorong investor dalam negeri untuk menanamkan modalnya di Indonesia
3. Dibukanya bidang-bidang usaha yang diperuntukan bagi sektor swasta.
4. Pembangunan ekonomi selayaknya disandarkan pada kemampuan rakyat Indonesia sendiri.
5. Untuk memanfaatkan modal dalam negeri yang dimiliki oleh orang asing
6. Penanaman modal (investment), penanaman uang aatau modal dalam suatu usaha dengan tujuan memperoleh keuntungan dari usaha tsb. Investasi sebagai wahana dimana dana ditempatkan dengan harapan untuk dapat memelihara atau menaikkan nilai atau memberikan hasil yang positif.
7. Bidang usaha yang dapat menjadi garapan PMDN adalah semua bidang usaha yang ada di Indonesia. Namun ada bidang-bidang yang perlu dipelopori oleh pemerintah dan wajib dilaksanakan oleh pemerintah . midal: yang berkaitan dengan rahasia dan pertahanan Negara
8. PMDN di luar bidang-bidang tersebut dapat diselenggarakan oleh swasta nasional. Misal : perikanan,perkebunan, pertanian, telekomunikasi, jasa umum, perdagangan umum.
9. PMDN merupakan sinergi bisnis antara modal Negara dan modal swasta nasional. Misal: di bidang telekomunikasi,perkebunan.

#### **2.1.4.2 Penanaman Modal Asing**

Penanaman Modal Asing adalah salah satu upaya untuk meningkatkan jumlah modal yang dipergunakan untuk pembangunan ekonomi yang bersumber dari luar negeri. Menurut Prof. M Sornarajah Penanaman modal asing adalah transfer modal baik nyata maupun tidak nyata dari suatu negara ke negara lain, tujuannya untuk dipakai di negara tersebut agar menghasilkan keuntungan di bawah monitoring dari pemilik modal, baik secara total maupun sebagian . Menurut Salim H.S. dan Budi Sutrisno (2008: 39), banyaknya keuntungan yang didapat oleh Indonesia dari penanam modal asing membuat negara semakin tergantung dengan keberadaan penanam modal asing, terutama dalam hal

pembangunan ekonomi Indonesia. Kelebihan penanaman modal asing atau *Foreign Direct Investment (FDI)* adalah :

1. Sifatnya permanen/jangka panjang;
2. Memberi andil dalam alih teknologi;
3. Memberi andil dalam alih ketrampilan; dan
4. Membuka lapangan kerja baru

Penanaman Modal Asing adalah salah satu upaya untuk meningkatkan jumlah modal untuk pembangunan ekonomi yang bersumber dari luar negeri.

Salvatore (2014: 109) menjelaskan Penanaman Modal Asing (PMA) terdiri atas:

1. Investasi portofolio (*portfolio investment*), yakni investasi yang melibatkan hanya aset-aset finansial saja, seperti obligasi dan saham, yang didenominasikan atau ternilai dalam mata uang nasional. Kegiatan-kegiatan investasi portofolio atau finansial ini biasanya berlangsung melalui lembaga lembaga keuangan seperti bank, perusahaan dana investasi, yayasan pensiun, dan sebagainya.
2. Investasi asing langsung (*foreign direct investment*), merupakan PMA yang meliputi investasi ke dalam aset-aset secara nyata berupa pembangunan pabrik-pabrik, pengadaan berbagai macam barang modal, pembelian tanah untuk keperluan produksi, dan sebagainya. Investasi asing secara langsung dapat dianggap sebagai salah satu sumber modal pembangunan ekonomi yang penting. Semua negara yang menganut sistem ekonomi terbuka, pada umumnya memerlukan investasi asing, terutama perusahaan yang menghasilkan barang dan jasa untuk kepentingan ekspor.

Penanaman modal asing sangat diperlukan bagi pembangunan perekonomian Indonesia, terdapat fungsi dan tujuan diperlukannya diperlukannya penanaman modal asing di Indonesia yaitu :

1. Mampu meningkatkan kesejahteraan pada masyarakat.
2. Sumber dana modal asing bisa dimanfaatkan untuk mempercepat investasi dan pertumbuhan ekonomi.
3. Modal asing dapat berperan penting dalam penggunaan dana untuk perbaikan structural agar menjadi lebih baik lagi.
4. Menjadi acuan agar ekonomi Indonesia semakin lebih baik lagi dari sebelumnya.
5. Menambah cadangan devisa negara dengan pajak yang diberikan oleh penanam modal. Membantu dalam proses industrilialisasi yang sedang dilaksanakan.
6. Membantu dalam penyerapan tenaga kerja lebih banyak sehingga mampu mengurangi pengangguran.

7. Untuk menarik arus modal yang signifikan besar ke suatu negara.
8. Untuk mendapatkan keuntungan berupa biaya produksi yang rendah, manfaat pajak lokal.
9. Menciptakan hambatan perdagangan untuk perusahaan lain.
10. Tukaran yang lebih tinggi dari pada di negara sendiri melalui tingkat pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, sistem perpajakan yang lebih menguntungkan dan infrastruktur yang lebih baik.

### **2.1.5 Pertumbuhan Ekonomi**

Menurut Sadono Sukimo (2011: 113) pertumbuhan ekonomi adalah perubahan tingkat kegiatan ekonomi yang berlaku dari tahun ke tahun. Pertumbuhan ekonomi adalah proses perubahan dengan kondisi perekonomian didalam suatu negara secara berkesinambungan yang menuju pada keadaan yang lebih baik selama dalam periode tertentu. Pertumbuhan ekonomi dapat dimaksud juga dengan proses kenaikan kapasitas produksi pada suatu perekonomian yang dibentuk kedalam kenaikan pendapatan nasional. Terbentuknya pertumbuhan ekonomi adalah indikasi keberhasilan pada pembangunan ekonomi didalam kehidupan masyarakat. Pengertian pertumbuhan ekonomi menurut Boediono (2014: 144):

Pertumbuhan ekonomi merupakan upaya peningkatan kapasitas produksi untuk mencapai penambahan output, yang diukur menggunakan Produk Domestik Bruto (PDB) maupun Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dalam suatu wilayah. Pertumbuhan ekonomi adalah proses kenaikan output perkapita dalam jangka panjang. Tekanannya pada tiga aspek, yaitu: proses, output perkapita dan jangka panjang. Pertumbuhan ekonomi adalah suatu proses, bukan suatu gambaran ekonomi pada suatu saat. Disini kita melihat aspek dinamis dari suatu perekonomian, yaitu bagaimana suatu perekonomian berkembang atau berubah dari waktu ke waktu. Tekanannya ada pada perubahan atau perkembangan itu sendiri.

Sedangkan Menurut Kuznets dalam Purnamasari (2010:44):

Pertumbuhan ekonomi adalah kenaikan kapasitas jangka panjang dari negara yang bersangkutan untuk menyediakan berbagai barang ekonomi kepada penduduknya. Kenaikan kapasitas tersebut dimungkinkan oleh adanya kemajuan atau penyesuaian-penyesuaian teknologi, intitusional dan ideologi terhadap berbagai keadaan yang ada. Perkembangan ekonomi mengandung arti yang lebih luas serta mencakup perubahan pada susunan ekonomi masyarakat secara menyeluruh.

Secara umum, pertumbuhan ekonomi didefinisikan sebagai peningkatan kemampuan dari suatu perekonomian dalam memproduksi barang-barang dan jasa-jasa. Pertumbuhan ekonomi adalah salah satu indikator yang amat penting dalam melakukan analisis tentang pembangunan ekonomi yang terjadi pada suatu negara. Pertumbuhan ekonomi menunjukkan sejauh mana aktivitas perekonomian akan menghasilkan tambahan pendapatan masyarakat pada suatu periode tertentu. Karena pada dasarnya aktivitas perekonomian adalah suatu proses penggunaan faktor-faktor produksi untuk menghasilkan output, maka proses ini pada gilirannya akan menghasilkan suatu aliran balas jasa terhadap faktor produksi yang dimiliki oleh masyarakat, dengan adanya pertumbuhan ekonomi maka diharapkan pendapatan masyarakat sebagai pemilik faktor produksi juga akan meningkat. Perekonomian dianggap mengalami pertumbuhan jika seluruh balas jasa riil terhadap penggunaan faktor produksi pada tahun tertentu lebih besar dari pada tahun sebelumnya. Dengan kata lain perekonomian dikatakan mengalami pertumbuhan jika pendapatan riil masyarakat pada tahun tertentu lebih besar dari pada pendapatan riil masyarakat pada tahun sebelumnya.

#### **2.1.5.1 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi**

Proses pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh dua macam faktor yaitu faktor ekonomi dan faktor non ekonomi. Faktor ekonomi adalah faktor produksi yang merupakan kekuatan utama yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Turun naiknya laju pertumbuhan ekonomi merupakan konsekuensi dari perubahan yang terjadi didalam faktor produksi. Menurut Sukirno (2011: 332) terdapat empat faktor produksi yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, yaitu:

1. Sumber Daya Alam

Faktor utama yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi adalah sumber daya alam atau tanah. Tanah sebagaimana digunakan dalam pertumbuhan ilmu ekonomi mencakup sumber daya alam seperti kesuburan tanah, letak dan susunannya, kekayaan hutan, mineral, iklim, sumber air, sumber lautan, dan sebagainya. Tersedianya sumber daya alam secara melimpah merupakan hal yang penting bagi pertumbuhan ekonomi. Suatu daerah yang kekurangan sumber alam tidak dapat membangun dengan cepat.

2. Organisasi

Organisasi merupakan bagian penting dari proses pertumbuhan. Organisasi berkaitan dengan penggunaan faktor produksi dalam kegiatan ekonomi. Organisasi bersifat melengkapi modal, buruh, dan membantu meningkatkan produktifitas. Dalam ekonomi modern para wiraswastawan tampil sebagai organisator dan pengambil resiko dalam ketidakpastian. Wiraswastawan bukanlah manusia dengan kemampuan biasa. Ia memiliki kemampuan khusus untuk bekerja dibandingkan orang lain. Menurut Schumpeter, seorang wiraswastawan tidak perlu seorang kapitalis. Fungsi utamanya adalah melakukan pembaharuan (inovasi).

3. Akumulasi Modal

Modal adalah persediaan faktor produksi yang secara fisik dapat direproduksi. Apabila stok modal naik dalam batas waktu tertentu, hal ini sering disebut sebagai akumulasi modal atau pembentukan modal. Dalam arti ini, pembentukan modal merupakan investasi dalam bentuk barang-barang modal yang dapat menaikkan stok modal, output nasional, dan pendapatan nasional. Jadi, pembentukan modal merupakan kunci utama meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Pembentukan modal diperlukan untuk memenuhi permintaan penduduk di daerah tersebut. Investasi dibidang barang modal tidak hanya meningkatkan produksi tetapi juga membuka kesempatan kerja. Pembentukan modal ini pula yang membawa kearah kemajuan teknologi yang pada akhirnya membawa kearah penghematan dalam produksi skala luas dan juga membawa kearah penggalian sumber alam, industrialisasi dan ekspansi pasar yang diperlukan bagi kemajuanekonomi.

4. Kemajuan Teknologi

Perubahan teknologi dianggap sebagai faktor penting dalam proses pertumbuhan ekonomi. Perubahan ini berkaitan dengan perubahan dalam metode produksi yang merupakan hasil pembaharuan atau hasil teknik penelitian baru. Perubahan dalam teknologi telah menaikkan produktifitas tenaga kerja, modal dan sektor produksi.

5. Pembagian Kerja dan Skala Produksi

Pembagian kerja menimbulkan peningkatan produktifitas. Keduanya membawa perekonomian kearah ekonomi skala besar yang selanjutnya membantu perkembangan industri. Perbaikan kerja menghasilkan perbaikan kemampuan produksi buruh. Setiap buruh menjadi lebih efisien dari sebelumnya.

### 2.1.5.2 Teori Pertumbuhan Ekonomi

Terdapat dua teori pertumbuhan ekonomi yaitu teori klasik dan teori neoklasik, dan beberapa tokoh-tokoh ekonomi, berikut penjelasannya :

#### 1. Teori klasik

Teori klasik pada pertumbuhan ekonomi ini sudah berkembang sejak abad ke-17. Ada dua tokoh yang sangat berpengaruh pada pemikiran teori klasik ini, yaitu Adam Smith dan David Ricardo.

Teori Pertumbuhan Ekonomi menurut Adam Smith:

Adam Smith adalah tokoh klasik yang telah banyak membahas tentang teori-teori ekonomi, termasuk salah satunya yaitu pertumbuhan ekonomi. Tertulis pada bukunya yang berjudul *An Inquiry into the Nature and Causes Wealrh of Nation* (1776). Adam Smith menjabarkan pendapatnya tentang bagaimana caranya menganalisis pertumbuhan ekonomi dengan dua faktor, yaitu faktor output total dan faktor pertumbuhan penduduk. Perhitungan output total dapat digunakan pada tiga variabel yaitu sumber daya alam, sumber daya manusia, dan persediaan capital atau modal. Sedangkan jika pada faktor kedua yaitu pertumbuhan penduduk, dilakukan dalam menentukan luas pasar dan laju pertumbuhan ekonomi.

Teori Pertumbuhan Ekonomi menurut David Ricardo:

David Ricardo memikirkan pada hal pertumbuhan ekonomi yang sangat dikenal yaitu tentang the law of diminishing return. Pemikiran David Ricardo ini tentang bagaimana pertumbuhan penduduk yang dapat mempengaruhi penurunan produk marginal dikarenakan terbatasnya pada jumlah tanah. Menurut David Ricardo, peningkatan produktivitas pada tenaga kerja lebih membutuhkan kemajuan tekonologi dan akumulasi modal yang sangat cukup. Dengan begitu, pertumbuhan ekonomi akan tercapai.

#### 2. Teori Neoklasik

Pada teori neoklasik tentang pertumbuhan ekonomi, ada dua tokoh yang sangat dikenal yaitu Joseph A Schumpeter dan Robert Solow.

Teori Pertumbuhan Ekonomi menurut Joseph A Schumpeter :

Menurut Joseph A Schumpeter pada buku yang ditulis berjudul *The Theory of Economic Development*, membahas tentang peran pengusaha dalam pembangunan. Schumpeter mendefinisikan bahwa proses pertumbuhan ekonokmi pada dasarnya yaitu suatu proses inovasi yang dilakukan pada para innovator dan wirausahawan.

Teori Pertumbuhan Ekonomi menurut Robert Solow :

Robert Solow memiliki pendapat tentang pertumbuhan ekonomi yaitu rangkaian kegiatan bersumber tentang empat faktor utama yaitu manusia, akumulasi modal, teknologi modern dan hasil (output).

### 3. Teori Neokeynes

Pada teori Neokeynes, sangat dikenal 2 tokoh yaitu Roy F. Harrod dan Evsey D Domar. Pandangan pada kedua tokoh tersebut yaitu tentang adanya pengaruh investasi dalam permintaan agregat dan pertumbuhan pada kapasitas produksi. Karena, investasi tersebut yang akan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Didalam teori neokeynes mempunyai pandangan tentang penanaman modal yaitu komponen yang paling utama pada proses penentuan suksesnya pertumbuhan ekonomi.

### 4. Teori W. W. Rostow

Pada teori W.W. Rostow telah membahas tentang pertumbuhan ekonomi dan Teori Pembangunan. Berbagai pemikirannya telah didefinisikan pada salah satu buku yang ditulisnya berjudul *The Stages of Economic, A Non Communist Manifesto*. Pada buku tersebut, Rostow memakai pendekatan sejarah dalam menjabarkan proses perkembangan ekonomi yang terjadi pada suatu masyarakat. Menurut Teori ini, pada suatu masyarakat, proses pertumbuhan ekonomi secara berlangsung melalui tahapan-tahapan, diantaranya:

- a. Masyarakat tradisional atau traditional society
- b. Tahap prasyarat tinggal landas atau *praconditions for take off*
- c. Tahap tinggal landas atau *the take off*
- d. Tahap menuju kedewasaan atau *maturity*
- e. Tahap konsumsi tinggi atau *high mass consumption*

### 5. Teori Karl Bucher

Pada teori Karl Bucher memiliki pendapat tentang mengenai tahapan perkembangan ekonomi yang berlangsung pada suatu masyarakat. Tahapan pertumbuhan ekonomi menurut Karl Bucher yaitu:

- a. Produksi dalam kebutuhan sendiri (rumah tangga yang tertutup).
- b. Perekonomian termasuk kedalam bentuk perluasan pertukaran produk pada pasar (rumah tangga kota).
- c. Perekonomian nasional memiliki peran perdagangan yang semakin diperlukan (rumah tangga nxxegara).
- d. Kegiatan dagang yang telah luas melintasi batas suatu negara (rumah tangga dunia).

### 2.1.5.3 Indikator Pertumbuhan Ekonomi wilayah

Sebagaimana teori yang dikemukakan oleh Rahardjo (2014: 4), bahwa ada beberapa indikator yang dapat dijadikan sebagai tolak ukur untuk melihat pertumbuhan ekonomi suatu wilayah adalah sebagai berikut:

- a. Ketidakseimbangan Pendapatan  
 Dalam keadaan yang ideal, di mana pendapatan dengan mutlak didistribusikan secara adil, 80 persen populasi terbawah akan menerima 80 persen dari total pendapatan, sedangkan 20 persen populasi teratas menerima 20 persen total pendapatan.
- b. Perubahan Struktur Perekonomian  
 Dalam masyarakat yang maju, pembangunan ekonomi yang dilaksanakan akan mengakibatkan perubahan struktur perekonomian, dimana terjadi kecendrungan bahwa kontribusi (peran) sektor pertanian terhadap nilai PDRB akan menurun, sedangkan kontribusi sektor industri akan meningkat. Sektor industri memiliki peranan sangat penting dalam pembangunan nasional dan regional, sektor industri dapat menyediakan lapangan kerja yang luas, memberikan peningkatan pendapatan kepada masyarakat, menghasilkan devisa yang dihasilkan dari ekspor. Oleh karena itu, perekonomian suatu wilayah harus di orientasikan selain sektor pertanian, tetapi harus pula diorientasikan kepada sektor industri.
- c. Pertumbuhan Kesempatan Kerja  
 Masalah ketenagakerjaan dan kesempatan kerja merupakan salah satu masalah yang strategis dan sangat mendesak dalam pembangunan di Indonesia. Penduduk Indonesia yang berjumlah lebih dari 240 jiwa, tingkat pengangguran cukup tinggi dan cenderung bertambah luas akibat krisis finansial Negara-negara di dunia. Untuk mengatasi krisis ekonomi yang sangat luas tersebut, diperlukan peranan pemerintah. Salah satu langkah strategis yang ditempuh adalah pembangunan prasarana (misalnya jalan). Pembangunan jalan yang menjangkau ke seluruh kantong-kantong produksi, akan mendorong peningkatan produksi berbagai komoditas sektor pertanian dalam arti luas (meliputi tanaman pangan, perkebunan, perikanan, peternakan, dan kehutanan) serta barang-barang hasil industri. Pembangunan prasarana dan sarana transportasi akan menunjang berkembangnya berbagai kegiatan di sektor-sektor lainnya (pertanian, perdagangan, industri, pariwisata dan lainnya).
- d. Tingkat dan Penyebaran Kemudahan  
 Dalam hal ini “kemudahan” diartikan sebagai kemudahan bagi masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya, baik pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari (seperti sandang, pangan, papan, memperoleh pelayanan pendidikan dan kesehatan, kesempatan melakukan ibadah, rekreasi dan sebagainya), maupun pemenuhan kebutuhan untuk dapat melakukan kegiatan usaha misalnya mendapatkan bahan baku, bahan penolong, suku cadang, listrik, air bersih, dan jasa-jasa seperti jasa angkutan, pemasaran, perbankan dan lainnya)

e. Produk Domestik Regional Bruto

Salah satu konsep yang sangat penting dalam pembangunan ekonomi regional (wilayah) adalah konsep Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). PDRB merupakan ukuran prestasi (keberhasilan) ekonomi dari seluruh kegiatan ekonomi. Salah satu indikator untuk melihat pertumbuhan ekonomi di suatu wilayah adalah dengan menggunakan data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Menurut definisi, PDRB adalah jumlah seluruh nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi di suatu wilayah (regional) tertentu dalam waktu tertentu tanpa melihat faktor kepemilikan. Pertumbuhan ekonomi suatu wilayah diperoleh dari kenaikan PDRB atas dasar harga konstan yang mencerminkan kenaikan produksi barang dan jasa dari tahun ke tahun. Menurut badan pusat statistik (BPS) ada tiga cara perhitungan PDRB dapat diperoleh melalui tiga pendekatan, yaitu pendekatan produksi, pendekatan pendapatan, dan pendekatan pengeluaran.

#### 2.1.5.4 Produk Domestik Regional Bruto

Salah satu indikator makro ekonomi yang paling penting untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu daerah periode tertentu adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu daerah tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unitekonom. Menurut Manurung (2008: 67), PDRB didefinisikan sebagai jumlah nilai tambah (*value added*) yang dihasilkan oleh seluruh unit produksi dalam satu daerah selama satu periode tertentu, atau merupakan jumlah seluruh nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit produksi di daerah dalam satu periode tertentu. Perhitungan PDRB disajikan dalam dua versi penilaian harga pasar, yaitu PDRB atas dasar harga berlaku dan PDRB atas dasar harga konstan. PDRB harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung berdasarkan harga pasar pada tahun yang bersangkutan. Data PDRB harga berlaku digunakan untuk melihat struktur ekonomi dan transformasi struktur ekonomi (*structural transformation*), serta untuk menghitung besaran pendapatan perkapita.

PDRB harga konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada tahun tertentu sebagai tahun dasar. Pada periode sekarang ini digunakan tahun 2010 sebagai tahun dasar. Fungsi PDRB

harga konstan adalah untuk mengukur laju pertumbuhan ekonomi. PDRB mencakup:

1. Semua barang dan jasa yang penghasilannya terdapat kompensasi.
2. Produksi yang ilegal dan tersembunyi.
3. Produksi barang untuk dikonsumsi sendiri.

## 2.2 Penelitian Terdahulu

Berikut ini merupakan tabel mengenai ringkasan penelitian terdahulu:

**Tabel 2.1**  
**Penelitian Terdahulu**

No.	Peneliti	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Aisyah Wulandari (2020)	Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Investasi, dan Belanja Daerah terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Luwu Timur	Independen: Pendapatan Asli Daerah, Penanaman Modal Dalam Negeri, Penanaman Modal Asing, dan Belanja Daerah  Dependen: Pertumbuhan Ekonomi	Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel pendapatan asli daerah, penanaman modal asing dan penanaman modal dalam negeri berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, sedangkan variabel belanja daerah tidak berpengaruh secara signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Luwu Timur.
2.	Dayu Suhardi (2018)	Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Investasi Dan Pengeluaran Pemerintah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kota Parepare	Independen: Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Investasi dan Pengeluaran pemerintah  Dependen: Pertumbuhan Ekonomi	1. Pendapatan asli daerah berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di kota Parepare. 2. Dana Perimbangan berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi kota

				<p>Parepare.</p> <p>3. Investasi berpengaruh negatif tetapi tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi kota Parepare.</p> <p>4. Secara simultan pengaruh PAD, Dana Perimbangan, Investasi, Pengeluaran Pemerintah terhadap Pertumbuhan Ekonomi kota Parepare tidak berpengaruh signifikan.</p>
3.	Benny Rojeston dkk (2020)	Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Bagi Hasil dan Dana Alokasi Umum Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Pada Kabupaten/Kota Di Sumatera Utara Periode 2016-2018	<p>Independen: Pendapatan Asli Daerah, Dana Bagi Hasil, dan Dana Alokasi Umum</p> <p>Dependen: Pertumbuhan Ekonomi</p>	<p>1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara parsial berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi pada Kabupaten/Kota di Sumatera Utara 2016-2018.</p> <p>2. Dana Bagi Hasil (DBH) secara parsial tidak berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi pada Kabupaten/Kota di Sumatera Utara</p>

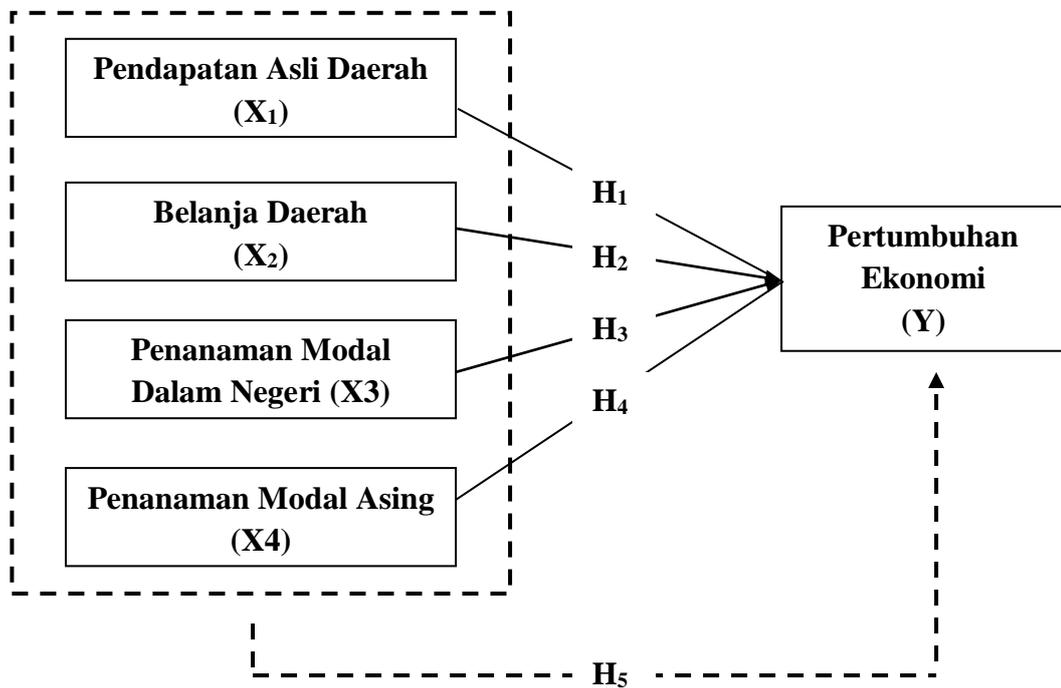
				<p>2016-2018.</p> <p>3. Dana Bagi Hasil (DAU) secara parsial tidak berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi pada Kabupaten/Kota di Sumatera Utara 2016-2018.</p> <p>4. PAD, DBH, dan DAU secara simultan tidak berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi pada Kabupaten/Kota di Sumatera Utara 2016-2018.</p>
4.	Barimbing dkk (2015)	Pengaruh Pad, Tenaga Kerja, dan Investasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Provinsi Bali	<p>Independen: Pad, Tenaga Kerja, dan Investasi</p> <p>Dependen: Pertumbuhan Ekonomi</p>	<p>Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara simultan PAD, tenaga kerja, dan investasi berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Bali.</p> <p>Secara parsial PAD dan tenaga kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Bali, sedangkan investasi tidak berpengaruh signifikan.</p>
5.	Siti Aminah (2016)	Analisis Pengaruh Investasi	Independen: Investasi Swasta, Pengeluaran	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: Investasi swasta

		Swasta dan Pengeluaran Pemerintah Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Kemiskinan di Provinsi Jambi	Pemerintah Daerah Dependen: Pertumbuhan Ekonomi dan Kemiskinan	dan pengeluaran pemerintah secara simultan berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Provinsi Jambi. Artinya kedua variabel independen ini dapat dijadikan instrument untuk menaikkan pertumbuhan ekonomi meskipun masih banyak variabel lain yang juga turut mempengaruhi pertumbuhan ekonomi.
--	--	--	--	---

*Sumber: Diolah Peneliti (2020)*

### 2.3 Kerangka Pemikiran

Menurut Sugiyono (2019: 88), kerangka pemikiran merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting dan mendasar serta pondasi bagi setiap pemikiran atau suatu bentuk proses dari keseluruhan penelitian yang akan dilakukan. Berdasarkan uraian dari tinjauan pustaka diatas, maka kerangka pemikiran dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:



**Gambar 2.1**  
**Kerangka Pemikiran**

Keterangan :

- : Pengaruh secara parsial
- - - → : Pengaruh secara simultan
- H<sub>1</sub> : Hipotesis 1
- H<sub>2</sub> : Hipotesis 2
- H<sub>3</sub> : Hipotesis 3
- H<sub>4</sub> : Hipotesis 4
- H<sub>5</sub> : Hipotesis 5

## 2.4 Hipotesis

Menurut Sugiyono (2019: 96), “Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, di mana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan”. Berdasarkan rumusan masalah yang telah dijelaskan, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- H<sub>1</sub> : Pendapatan Asli Daerah berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi Provinsi di Indonesia
- H<sub>2</sub> : Belanja Daerah berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi Provinsi di Indonesia.
- H<sub>3</sub> : Penanaman Modal Dalam Negeri berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi Provinsi di Indonesia
- H<sub>4</sub> : Penanaman Modal Asing berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi Provinsi di Indonesia
- H<sub>5</sub> : Pendapatan Asli Daerah, Belanja Daerah, Penanaman Modal Dalam Negeri, dan Penanaman Modal Asing berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi Provinsi di Indonesia.

